BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

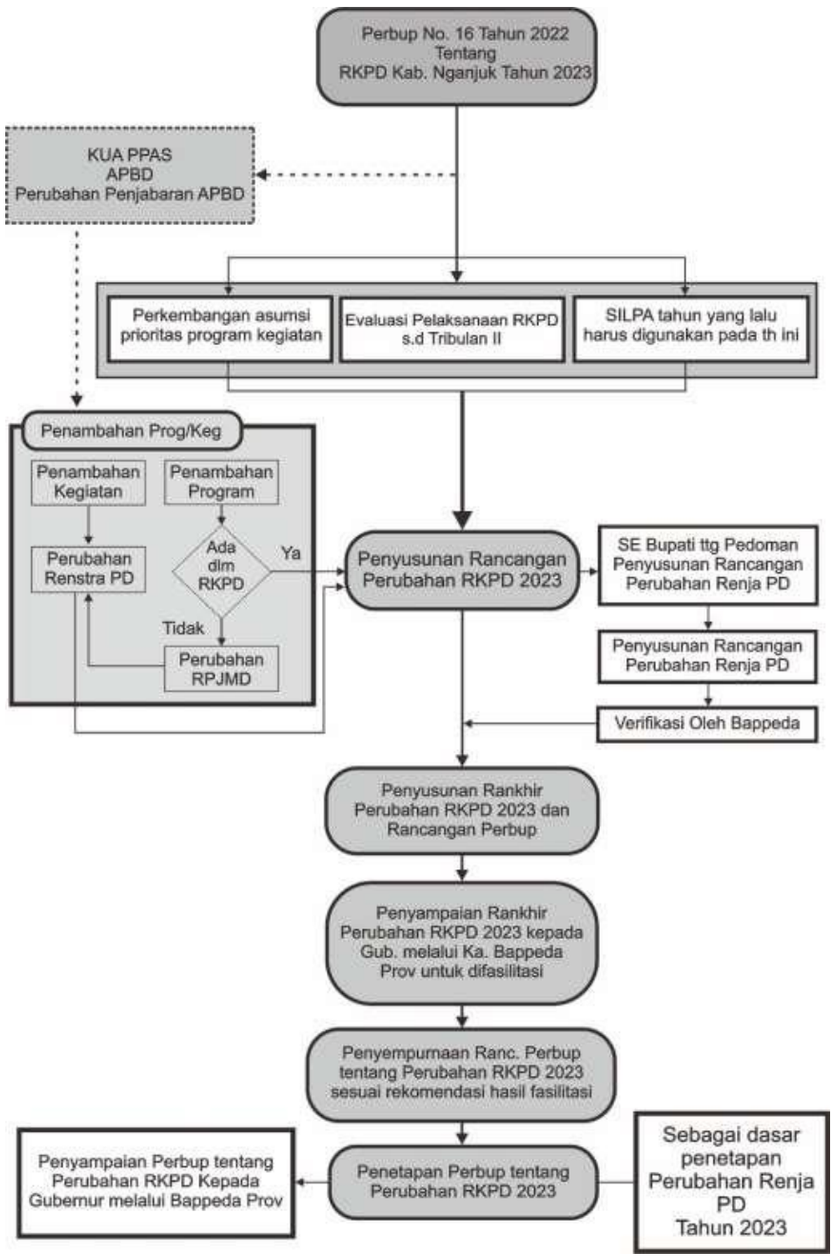
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Nganjuk disusun atas dasar

a. Landasan Idiil : Pancasila

b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

c. Landasan Operasional :

2 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

18 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
21 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
23 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
24 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
25 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
26 Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023;

34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;

37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya Tahun Anggaran 2023;

38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*;

39 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

40 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tantang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

41 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

42 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);

43 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

44 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);

45 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

46 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022;

47 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

48 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;

49 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 188/263/K/411.013/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;

50 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 19);

51 Praturan Bupati Nganjuk Nomor 16 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dan untuk menyesuaikan dengan Perubahan RKPD Tahun 2024, serta untuk melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

1. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2024;
2. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024
4. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. **BAB I. PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Triwulan I Tahun 2024;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.2 Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Triwulan II Tahun 2024

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020

(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8) dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang merupakan pejabat eselon II, dibantu oleh sekretaris dan empat Kepala Bidang yang masing-masing merupakan pejabat eselon III.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

Tugas Pokok : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu adanya data dukung berkaitan dengan data dan informasi perencanaan bidang sosial dan permberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada semester II Tahun 2024.

Berdasarkan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu 2 Tujuan. Tujuan pertama "**Mengurangi Penduduk Miskin"** mengacu pada urusan sosial dengan indikator **"Persentase Penduduk Miskin Ekstrim".**

Pada evaluasi Renja triwulan II realisasi sebesar 10,99% dan capaian kinerja sebesar 4,54%.

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Mengurangi Penduduk Miskin**	**Persentase Penduduk Miskin Ekstrim**	**0,5**	**10,99**	**4,54**
2	**Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**70,50**	**70,87 (Tahun 2022)**	**100,52**

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.

Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup seharihari tidak lebih dari Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan.

Tujuan **Mengurangi Penduduk Miskin"** memiliki Sasaran sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	100	100	100
2		Persentase jumlah PSKS yang aktif	72,5	74,44	102,67

Berdasarkan sasaran tersebut diperoleh Data PMKS/PPKS dan Data PSKS per Juni Tahun 2024, sebagai berikut:

Data PMKS/PPKS Per Juni Tahun 2024

Jenis PMKS	Jumlah PMKS
Keluarga Fakir Miskin	53,655
Anak Jalanan	3
Tuna Susila	0
Pengemis	0
Gelandangan dan Gelandangan Psikotik	23
Anak Balita Terlantar	0
Anak Terlantar	2
Anak Berhadapan dengan Hukum	16
Anak dengan Kedisabilitasan :	**39**
a. Tubuh	39
b. Netra	0
c. Cacat Wicara	0
d. Mental	0
e. Cacat Ganda	0
Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Diperlakukan Salah	0
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0
Lanjut Usia Terlantar	16
Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	**56**
a. Tubuh	56
b. Netra	0
c. Cacat Wicara	0
d. Mental	0
e. Cacat Ganda	0
f. Penderita Penyakit Kronis	0
Pemulung	0
Kelompok Minoritas (Waria 108 dan Gay 980)	366
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	0
Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	2484
Korban Penyalah Gunaan Napsa	0
Korban Trafficking	0
Korban Tindakan Kekerasan atau yg Diperlakukan Salah	**0**
a. Wanita	0
b. Laki - laki	0
c. Lanjut Usia	0
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	1
Korban Bencana Alam	306
Korban Bencana Sosial	0
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0
Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	0
Jumlah	**56,967**

Data PSKS Per Juni 2024

Jenis_PSKS	Jumlah PSKS yang Aktif	Jumlah PSKS yang Ada	Satuan
Pekerja Sosial Profesional	2	2	Orang
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80	117	Orang
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	18	18	Orang
Organisasi Sosial	22	27	Orang
Karang Taruna	222	305	Orang
TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat)	20	20	Orang
Jumlah Total	**364**	**489**	**Orang**

Tujuan kedua "**Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan"** mengacu pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Indikator **"Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)"** pada evaluasi Renja triwulan II realisasi dan capaian kinerja masih menggunakan hasil tahun 2022 berdasarkan sumber data BPS sebesar 70,87 dengan capaian 100,52%.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Tujuan "**Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan"** memiliki sasaran sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	33,33	100	300,03
2		Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100	100	100
3		Skor Kabupaten Layak Anak	(650) Madya	0	0

Berdasarkan Sasaran tersebut diperoleh Data Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender, Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya, dan Skor Kabupaten Layak Anak.

Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Per Juni Tahun 2024

Nama Lembaga Pemerintah	Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
DISPORABUDPAR	DISPORABUDPAR
Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Dinas Sosial PPPA	Dinas Sosial PPPA
Dinas PPKB	Dinas PPKB
DISPENDUKCAPIL	DISPENDUKCAPIL
Dinas PMD	Dinas PMD
Dinas PM DAN PTSP	Dinas PM DAN PTSP
Disperindag	Disperindag
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
Diskominfo	Diskominfo
Dinas PUPR	Dinas PUPR
Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Dinas PRKPP	Dinas PRKPP
Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
Dinas KPP	Dinas KPP
Dinas Arpus	Dinas Arpus
Satpol PP	Satpol PP
Dinas Damkar dan Penyelamatan	Dinas Damkar dan Penyelamatan
Bappeda	Bappeda
BPKAD	BPKAD
Bapenda	Bapenda
BKPSDM	BKPSDM
Bakesbangpol	Bakesbangpol
BPBD	BPBD
RSU Kertosono	RSU Kertosono
RSU Nganjuk	RSU Nganjuk
Kecamatan Bagor	Kecamatan Bagor
Kecamatan Baron	Kecamatan Baron
Kecamatan Berbek	Kecamatan Berbek
Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang
Kecamatan Jatikalen	Kecamatan Jatikalen

Kecamatan Kertosono	Kecamatan Kertosono
Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong
Kecamatan Loceret	Kecamatan Loceret
Kecamatan Nganjuk	Kecamatan Nganjuk
Kecamatan Ngetos	Kecamatan Ngetos
Kecamatan Ngluyu	Kecamatan Ngluyu
Kecamatan Ngronggot	Kecamatan Ngronggot
Kecamatan P a c e	Kecamatan P a c e
Kecamatan Patianrowo	Kecamatan Patianrowo
Kecamatan Prambon	Kecamatan Prambon
Kecamatan Rejoso	Kecamatan Rejoso
Kecamatan Sawahan	Kecamatan Sawahan
Kecamatan Sukomoro	Kecamatan Sukomoro
Kecamatan Tanjunganom	Kecamatan Tanjunganom
Kecamatan Wilangan	Kecamatan Wilangan
52	**52**

Kasus Tindak Kekerasan dan Traficking terhadap Perempuan dan Anak Yang Difasilitasi Penyelesaiannya pada Per Juni Tahun 2024 sejumlah 39 Kasus. Berikut ini data Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terlaporkan dan telah selesai ditangani sesuai dengan jenis layanan yang diperlukan pada Per Juni Tahun 2024 :

Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Telah Ditangani Per Juni Tahun 2024

Jenis_Tindak_Kekerasan	Jumlah Kasus yang Tertangani
Fisik	6
Psikis	17
Seksual	10
Penelataran	1
Trafficking	0
Lainnya	5
Jumlah	**39**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, kebijakan pembangunan kabupaten atau kota layak anak didefinisikan sebagai, “Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah daerah/kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasiskan hak-hak anak melalui komitmen dan sumber daya negara, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara komprehensif dan berkesinambungan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan evaluasi Internal dan mengkoordinasikan terkait penilaian Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2023 mendapatkan kategori Madya, sehingga untuk penilaian Tahun 2024 masih dalam tahap evaluasi.

Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

(Target Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Mengacu pada Sasaran RKPD

Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial

Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Dinas Sosial PPPA pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/ Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		OPD
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7*100 %		14=12		15=14/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																								
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																								
A	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	79 Nilai	20,629,494,658	96 %	6,155,362,042	77 Nilai	5,255,285,500	22.18 Nilai	620,360,288	78.35 Nilai	1,324,055,432					101 Nilai	1,944,415,720	131%	37 %	100.53 Nilai	1,944,415,720	127%	9%	
I		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terpenuhi	79 %	76,096,479	100 %	41,502,500	77 %	59,452,000	12.50 %	6,373,975	33.33 %	0					45.83 %	6,373,975	60%	11 %	45.83 %	6,373,975	58%	8%	

1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	46,993,296	100	%	23,783,000	4	Laporan	48,715,000	1	Laporan	6,373,975	1	Laporan	0					2	Laporan	6,373,975	50%	13%	2	Laporan	6,373,975	17%	14%	
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	29,103,183	100	%	17,719,500	4	Laporan	10,737,000	4	Laporan	0	0	Laporan	0					4	Laporan	0	100%	0%	4	Laporan	0	33%	0%	
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**79**	**%**	**14,804,448,529**	**75**	**%**	**3,643,416,337**	**77**	**%**	**3,864,967,000**	**32.25**	**%**	**357,774,350**	**33.33**	**%**	**1,092,045,549**					**65.58**	**%**	**1,449,819,899**	**85%**	**38%**	**66**	**%**	**1,449,819,899**	**83%**	**10%**	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Orang/Bulan	14,059,220,743	100	%	3,192,778,972	24	Orang/Bulan	3,553,994,000	24	Orang/Bulan	316,691,161	24	Orang/Bulan	990,139,569					48	Orang/Bulan	1,306,830,730	200%	37%	48	Orang/Bulan	1,306,830,730	67%	9%	
2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	Dokumen	717,874,502	100	%	441,013,865	12	Dokumen	295,583,000	5	Dokumen	34,723,689	2	Dokumen	101,905,980					7	Dokumen	136,629,669	58%	46%	7	Dokumen	136,629,669	19%	19%	
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	13,676,642	0	%	3,826,500	1	Laporan	6,966,000	1	Laporan	6,359,500	0	Laporan	0					1	Laporan	6,359,500	100%	91%	1	Laporan	6,359,500	33%	46%	

4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	54	Laporan	13,676,642	100	%	5,797,000	18	Laporan	8,424,000	4	Laporan	0	5	Laporan	0					9	Laporan	0	50%	0%	9	Laporan	0	17%	0%	
III		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**79**	**%**	**140,244,480**	**100**	**%**	**92,150,000**	**77**	**%**	**50,000,000**	**0.00**	**%**	**3,000,000**	**100**	**%**	**42,250,000**					**100.00**	**%**	**45,250,000**	**130%**	**91%**	**100**	**%**	**45,250,000**	**127%**	**32%**	
1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	140,244,480	100	%	92,150,000	40	Orang	50,000,000	0	Orang	3,000,000	40	Orang	42,250,000					40	Orang	45,250,000	100%	91%	40	Orang	45,250,000	667%	32%	
IV		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun**	**79**	**%**	**750,684,472**	**100**	**%**	**453,313,701**	**77**	**%**	**240,377,150**	**22.44**	**%**	**52,350,324**	**34.21**	**%**	**40,132,053**					**56.65**	**%**	**92,482,377**	**74%**	**38%**	**57**	**%**	**92,482,377**	**72%**	**12%**	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	37,605,750	100	%	44,381,490	12	Paket	8,442,500	3	Paket	300,000	3	Paket	1,997,000					6	Paket	2,297,000	50%	27%	6	Paket	2,297,000	100%	6%	
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	365,286,067	100	%	219,970,838	7	Paket	113,857,100	1	Paket	24,178,958	2	Paket	11,698,508					3	Paket	35,877,466	43%	32%	3	Paket	35,877,466	25%	10%	
3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	151,702,471	100	%	82,973,550	5	Paket	49,520,050	1	Paket	9,049,050	2	Paket	5,296,950					3	Paket	14,346,000	60%	29%	3	Paket	14,346,000	50%	9%	

4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	12,622,005	100	%	3,600,000	1	Dokumen	1,800,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0					0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	0%	0%	
5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	110,773,768	100	%	59,824,793	12	Laporan	42,277,700	3	Laporan	6,416,916	3	Laporan	13,148,595					6	Laporan	19,565,511	50%	46%	6	Laporan	19,565,511	100%	18%	
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	72,694,411	100	%	42,563,030	12	Laporan	24,479,800	3	Laporan	12,405,400	3	Laporan	7,991,000					6	Laporan	20,396,400	50%	83%	6	Laporan	20,396,400	200%	28%	
V		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan**	**79**	**%**	**1,577,750,400**	**100**	**%**	**195,607,400**	**77**	**%**	**109,221,950**	**27.27**	**%**	**26,418,750**	**37.50**	**%**	**24,356,250**					**64.77**	**%**	**50,775,000**	**84%**	**46%**	**65**	**%**	**50,775,000**	**82%**	**3%**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	876,528,000	0	%	-	5	Unit	49,914,350	1	Unit	5,494,500	1	Unit	0					2	Unit	5,494,500	40%	11%	2	Unit	5,494,500	67%	1%	
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	701,222,400	100	%	195,607,400	6	Unit	59,307,600	2	Unit	20,924,250	3	Unit	24,356,250					5	Unit	45,280,500	83%	76%	5	Unit	45,280,500	83%	6%	
VI		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**	**79**	**%**	**872,671,277**	**100**	**%**	**370,017,647**	**77**	**%**	**445,405,000**	**26.00**	**%**	**76,875,039**	**35.13**	**%**	**91,684,222**					**61.13**	**%**	**168,559,261**	**79%**	**38%**	**61**	**%**	**168,559,261**	**77%**	**19%**	
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Laporan	28,048,896	100	%	2,652,960	2	Laporan	1,725,000	1	Laporan	300,000	1	Laporan	330,000					2	Laporan	630,000	100%	37%	2	Laporan	630,000	33%	2%	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9	Laporan	555,368,141	100	%	217,398,387	36	Laporan	135,300,000	9	Laporan	24,291,675	9	Laporan	14,114,522					18	Laporan	38,406,197	50%	28%	18	Laporan	38,406,197	200%	7%	
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	289,254,240	100	%	149,966,300	12	Laporan	308,380,000	3	Laporan	52,283,364	3	Laporan	77,239,700					6	Laporan	129,523,064	50%	42%	6	Laporan	129,523,064	17%	45%	

VII		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan\ Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat**	**79**	**%**	**2,407,599,021**	**100**	**%**	**1,359,354,457**	**77**	**%**	**485,862,400**	**22.22**	**%**	**97,567,850**	**20.00**	**%**	**33,587,358**					**42.22**	**%**	**131,155,208**	**55%**	**27%**	**42**	**%**	**131,155,208**	**53%**	**5%**	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90	Unit	965,330,489	100	%	535,855,970	31	Unit	356,956,500	10	Unit	32,868,050	10	Unit	30,082,358					20	Unit	62,950,408	65%	18%	20	Unit	62,950,408	22%	7%	
2		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150	Unit	525,916,800	100	%	362,803,830	3	Unit	1,455,000	0	Unit	0	0	Unit	0					0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0	0%	0%	
3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	Unit	149,054,530	100	%	45,609,000.00	51	Unit	6,750,000	9	Unit	2,495,000	4	Unit	1,505,000					13	Unit	4,000,000	25%	59%	13	Unit	4,000,000	17%	3%	
4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit	767,297,202	100	%	415,085,657.00	5	Unit	120,700,900	1	Unit	62,204,800	0	Unit	2,000,000					1	Unit	64,204,800	20%	53%	1	Unit	64,204,800	11%	8%	
B	**Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**85**	**%**	**1,100,129,302**	**100**	**%**	**738,926,458**	**85**	**%**	**366,882,750**	**0.00**	**%**	**57,000,000**	**20.00**	**%**	**76,650,000**					**20.00**	**%**	**133,650,000**	**24%**	**36%**	**20**	**%**	**133,650,000**	**24%**	**12%**	
I		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**85**	**%**	**84,581,224**	**100**	**%**	**31,454,800**	**85**	**%**	**13,961,700**	**0.00**	**%**	**0**	**0.00**	**%**	**0.00**					**0.00**	**%**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**%**	**0**	**0%**	**0%**	
1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12	Dokumen	84,581,224	100	%	31,454,800	4	Dokumen	13,961,700	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0					0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	0%	0%	

II		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota**	**85**	**%**	**1,015,548,078**	**100**	**%**	**707,471,658**	**85**	**%**	**352,921,050**	**0.00**	**%**	**57,000,000**	**40.00**	**%**	**76,650,000**					**40.00**	**%**	**133,650,000**	**47%**	**38%**	**40**	**%**	**133,650,000**	**47%**	**13%**	
1		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	300	Orang	72,293,130	100	%	59,905,400	100	Orang	16,234,100	0	Orang	0	0	Orang	0					0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0	0%	0%	
2		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	60	Orang	868,925,098	100	%	545,601,958	20	Orang	250,274,900	0	Orang	57,000,000	0	Orang	76,650,000					0	Orang	133,650,000	0%	53%	0	Orang	133,650,000	0%	15%	
3		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	50	Lembaga	74,329,850	100	%	101,964,300.00	80	Lembaga	86,412,050	0	Lembaga	0	80	Lembaga	0					80	Lembaga	0	100%	0%	80	Lembaga	0	160%	0%	
C	**Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS**	**85**	**%**	**9,433,289,300**	**82**	**%**	**4,780,462,631**	**85**	**%**	**2,195,326,950**	**3.04**	**%**	**46,490,449**	**3.38**	**%**	**136,868,050**					**6.41**	**%**	**183,358,499**	**8%**	**8%**	**6**	**%**	**183,358,499**	**8%**	**2%**	
I		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Sosial di Luar Panti**	**85**	**%**	**5,320,034,755**	**68**	**%**	**2,423,513,167**	**85**	**%**	**1,055,664,800**	**3.56**	**%**	**14,968,788**	**4.17**	**%**	**18,598,000**					**7.73**	**%**	**33,566,788**	**9%**	**3%**	**8**	**%**	**33,566,788**	**9%**	**1%**	

1		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	380	Orang	237,246,250	99	%	89,887,941.00	125	Orang	37,216,800	19	Orang	4,000,000	12	Orang	0					31	Orang	4,000,000	25%	11%	31	Orang	4,000,000	8%	2%	
2		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.29	Orang	2,662,233,000.000	6	%	1,228,233,500.00	420	Orang	536,500,000	0	Orang	0	0	Orang	1,200,000					0	Orang	1,200,000	0%	0%	0	Orang	1,200,000	0%	0%	
4		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.03	Orang	2,420,555,505	100	%	1,105,391,726.00	325	Orang	481,948,000	12	Orang	10,968,788	23	Orang	17,398,000					35	Orang	28,366,788	11%	6%	35	Orang	28,366,788	3398%	1%	
II		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti**	**85**	**%**	**4,113,254,545**	**96**	**%**	**2,356,949,464**	**85**	**%**	**1,139,662,150**	**2.51**	**%**	**31,521,661**	**2.58**	**%**	**118,270,050**					**5.09**	**%**	**149,791,711**	**6%**	**13%**	**5**	**%**	**149,791,711**	**6%**	**4%**	
1		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	3.401	Orang	572,434,452	100	%	659,529,873	1.050	Orang	185,059,200	0	Orang	4,031,170	0	Orang	76,058,500					0	Orang	80,089,670	0%	43%	0	Orang	80,089,670	0%	14%	
2		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	325	Orang	769,942,963	97	%	378,450,591	95	Orang	167,502,950	17	Orang	26,490,491	30	Orang	38,111,550					47	Orang	64,602,041	49%	39%	47	Orang	64,602,041	14%	8%	

3		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	80	Orang	38,230,500	85	%	13,489,000	24	Orang	5,000,000	13	Orang	1,000,000	0	Orang	500,000					13	Orang	1,500,000	54%	30%	13	Orang	1,500,000	16%	4%	
4		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	63	Dokumen	2,732,646,630	100	%	1,305,480,000	22	Dokumen	782,100,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	3,600,000					0	Dokumen	3,600,000	0%	0%	0	Dokumen	3,600,000	0%	0%	
D	**Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PPKS/ PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**85**	**%**	**27,947,329,071**	**100**	**%**	**3,699,152,050**	**85**	**%**	**10,987,117,200**	**0.00**	**%**	**19,679,958**	**24.49**	**%**	**35,405,000**					**24.49**	**%**	**55,084,958**	**29%**	**1%**	**24**	**%**	**55,084,958**	**29%**	**0%**	
I		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval**	**85**	**%**	**27,947,329,071**	**100**	**%**	**3,699,152,050**	**85**	**%**	**10,987,117,200**	**0.00**	**%**	**19,679,958**	**24.49**	**%**	**35,405,000**					**24.49**	**%**	**55,084,958**	**29%**	**1%**	**24**	**%**	**55,084,958**	**29%**	**0%**	
1		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	600.25	Keluarga	532,793,601	100	%	142,511,050	21.620	Keluarga	204,762,300	0	Keluarga	11,631,170	53,655	Keluarga	23,291,000					53,655	Keluarga	34,922,170	25%	17%	53,655	Keluarga	34,922,170	8939%	7%	
2		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	15.166	Keluarga	27,414,535,470	100	%	3,556,641,000	4.434	Keluarga	10,782,354,900	0	Keluarga	8,048,788	0	Keluarga	12,114,000					0	Keluarga	20,162,788	0%	0%	0	Keluarga	20,162,788	0%	0%	
E	**Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangani**	**85**	**%**	**863,840,278**	**100**	**%**	**5,791,900,054**	**85**	**%**	**340,937,450**	**40.69**	**%**	**54,000,000**	**18.81**	**%**	**124,740,500**					**59.49**	**%**	**178,740,500**	**70%**	**52%**	**59**	**%**	**178,740,500**	**70%**	**21%**	
I		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**	**85**	**%**	**110,567,028**	**100**	**%**	**5,791,900,054**	**85**	**%**	**71,553,650**	**54.90**	**%**	**0**	**1.61**	**%**	**70,740,500**					**56.51**	**%**	**70,740,500**	**66%**	**99%**	**57**	**%**	**70,740,500**	**66%**	**64%**	

1		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	300	Orang	110,567,028	100	%	5,791,900,054	550	Orang	71,553,650	302	Orang	0	4	Orang	70,740,500					306	Orang	70,740,500	56%	99%	306	Orang	70,740,500	102%	64%	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah Kampung yang Mendapatkan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota**	**85**	**%**	**753,273,250**	**0**	**%**	**0**	**85**	**%**	**269,383,800**	**26.47**	**%**	**54,000,000**	**36.00**	**%**	**54,000,000**					**62.47**	**%**	**108,000,000**	**73%**	**40%**	**62**	**%**	**108,000,000**	**73%**	**14%**	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	54	Orang	753,273,250	0	%	0	68	Orang	269,383,800	18	Orang	54,000,000	18	Orang	54,000,000					36	Orang	108,000,000	53%	40%	36	Orang	108,000,000	67%	14%	
F	**Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Pengelolaan TMP**	**85**	**%**	**187,276,916**	**100**	**%**	**112,029,962**	**85**	**%**	**70,037,750**	**0.00**	**%**	**5,280,000**	**0.00**	**%**	**7,920,000**					**0.00**	**%**	**13,200,000**	**0%**	**19%**	**0**	**%**	**13,200,000**	**0%**	**7%**	
A		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan TMP**	**85**	**%**	**187,276,916**	**100**	**%**	**112,029,962**	**85**	**%**	**70,037,750**	**0.00**	**%**	**5,280,000**	**0.00**	**%**	**7,920,000**					**0.00**	**%**	**13,200,000**	**0%**	**19%**	**0**	**%**	**13,200,000**	**0%**	**7%**	
1		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	1.686	Makam	187,276,916	100	%	112,029,962	560	Makam	70,037,750	0	Makam	5,280,000	0	Makam	7,920,000					0	Makam	13,200,000	0%	19%	0	Makam	13,200,000	0%	7%	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																															
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																															
A	**Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah**	**100**	**%**	**1,062,125,838**	**100**	**%**	**510,056,727**	**100**	**%**	**291,000,000**	**6.61**	**%**	**6,887,500**	**31.67**	**%**	**46,241,000**					**38.29**	**%**	**53,128,500**	**38%**	**18%**	**38**	**%**	**53,128,500**	**38%**	**5%**	

I		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG**	**100**	**%**	**363,898,591**	**100**	**%**	**141,570,677**	**100**	**%**	**64,500,000**	**0.00**	**%**	**0**	**48.83**	**%**	**12,634,000**					**48.83**	**%**	**12,634,000**	**49%**	**20%**	**49**	**%**	**12,634,000**	**49%**	**3%**	
1		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	3	Dokumen	25,024,545	100	%	13,791,000	1	Dokumen	7,200,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0					0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	0%	0%	
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	3	Dokumen	167,525,426	100	%	58,046,500.00	1	Dokumen	15,650,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0					0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	0%	0%	
3		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	45	Perangkat Daerah	85,674,310	100	%	55,955,177.00	42	Perangkat Daerah	34,650,000	0	Perangkat Daerah	0	0	Perangkat Daerah	6,851,000					0	Perangkat Daerah	6,851,000	0%	20%	0	Perangkat Daerah	6,851,000	0%	8%	
4		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	45	Perangkat Daerah	85,674,310	100	%	13,778,000.00	42	Perangkat Daerah	7,000,000	0	Perangkat Daerah	0	42	Perangkat Daerah	5,783,000					42	Perangkat Daerah	5,783,000	100%	83%	42	Perangkat Daerah	5,783,000	93%	7%	

II		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**100**	**%**	**157,803,750**	**100**	**%**	**24,633,500**	**100**	**100%**	**18,200,000**	**0.00**	**%**	**0**	**0.00**	**%**	**0**					**0.00**	**%**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**100%**	**0**	**0%**	**0%**	
1		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	4	Dokumen	99,303,750	100	%	7,973,000.00	4	Dokumen	8,200,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0					0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	0%	0%	
2		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	65	Organisasi	58,500,000	100	%	16,660,500	65	Organisasi	10,000,000	0	Organisasi	0	0	Organisasi	0					0	Organisasi	0	0%	0%	0	Organisasi	0	0%	0%	
III		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**	**100**	**%**	**540,423,497**	**100**	**%**	**343,852,550**	**100**	**%**	**208,300,000**	**19.84**	**%**	**6,887,500**	**46.19**	**%**	**33,607,000**					**66.03**	**%**	**40,494,500**	**66%**	**19%**	**66**	**%**	**40,494,500**	**66%**	**7%**	
1		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	65	Lembaga	33,018,497	100	%	16,671,000	65	Lembaga	9,500,000	0	Lembaga	0	0	Lembaga	0					0	Lembaga	0	0%	0%	0	Lembaga	0	0%	0%	

2		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3.175	Orang	375,000,000	100	%	247,558,400	2,000	Orang	190,800,000	410	Orang	6,887,500	765	Orang	33,607,000					1,175	Orang	40,494,500	59%	21%	1,175	Orang	40,494,500	37008%	11%	
3		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1	Dokumen	132,405,000	100	%	79,623,150	1	Dokumen	8,000,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0					0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	0%	0%	
B	**Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak**	**PROGRAM PERLINDUNGANPEREMPUAN**	**Persentase Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan**	**100**	**%**	**1,075,444,811**	**100**	**%**	**264,260,100**	**100**	**%**	**222,826,800**	**0.00**	**%**	**0**	**0.00**	**%**	**0**					**0.00**	**%**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**%**	**0**	**0%**	**0%**	
I		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani**	**100**	**%**	**963,719,250**	**100**	**%**	**225,000,000**	**100**	**%**	**150,000,000**	**0.00**	**%**	**0**	**0.00**	**%**	**0**					**0.00**	**%**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**%**	**0**	**0%**	**0%**	
1		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	1.110	Orang	963,719,250	100	%	225,000,000	370	Orang	150,000,000	0	Orang	0	0	Orang	0					0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0	0%	0%	
II		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**	**100**	**%**	**111,725,561**	**100**	**%**	**39,260,100**	**100**	**%**	**72,826,800**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**					**0**	**%**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**%**	**0**	**0%**	**0%**	

1		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	12	Dokumen	111,725,561	100	%	39,260,100.00	8	Dokumen	72,826,800	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0					0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	0%	0%	
C	**Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Lembaga/ Keluarga yang Mendapat Layanan Responsif Gender**	**100**	**%**	**653,000,000**	**100**	**%**	**242,573,969**	**100**	**%**	**145,831,050**	**0.00**	**%**	**13,848,788**	**16.83**	**%**	**20,752,000**					**16.83**	**%**	**34,600,788**	**17%**	**24%**	**17**	**%**	**34,600,788**	**17%**	**5%**	
I		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100**	**%**	**277,000,000**	**100**	**%**	**116,569,195**	**100**	**%**	**55,899,700**	**0.00**	**%**	**4,024,394**	**0.00**	**%**	**6,026,000**					**0.00**	**%**	**10,050,394**	**0%**	**18%**	**0**	**%**	**10,050,394**	**0%**	**4%**	
1		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	150	Perangkat Daerah	63,000,000	100	%	23,019,750	50	Perangkat Daerah	9,857,500	0	Perangkat Daerah	0	0	Perangkat Daerah	0					0	Perangkat Daerah	0	0%	0%	0	Perangkat Daerah	0	0%	0%	
2		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	3	Dokumen	153,000,000	100	%	70,565,445	1	Dokumen	36,041,700	0	Dokumen	4,024,394	0	Dokumen	6,026,000					0	Dokumen	10,050,394	0%	28%	0	Dokumen	10,050,394	0%	7%	

3		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	3	Laporan	61,000,000	100	%	22,984,000.00	1	Laporan	10,000,500	0	Laporan	0	0	Laporan	0					0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0	0%	0%	
II		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan**	**100**	**100 %**	**189,000,000**	**100**	**%**	**65,039,250**	**100**	**%**	**29,931,500**	**0.00**	**%**	**0**	**50.49**	**%**	**0**					**50.49**	**%**	**0**	**50%**	**0%**	**50**	**100 %**	**0**	**50%**	**0%**	
1		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	50	Lembaga	63,000,000	100	%	23,723,750.00	50	Lembaga	9,986,500	0	Lembaga	0	0	Lembaga	0					0	Lembaga	0	0%	0%	0	Lembaga	0	0%	0%	
2		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	150	Orang	63,000,000	100	%	22,900,000.00	50	Orang	9,972,500	0	Orang	0	50	Orang	0					50	Orang	0	100%	0%	50	Orang	0	33%	0%	
3		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	3	Dokumen	63,000,000	100	%	18,415,500	1	Dokumen	9,972,500	0	Dokumen	0	1	Dokumen	0					1	Dokumen	0	100%	0%	1	Dokumen	0	33%	0%	

III		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan KG dan Hak Anak**	**100**	**%**	**187,000,000**	**100**	**%**	**60,965,524**	**100**	**%**	**59,999,850**	**0.00**	**%**	**9,824,394**	**0.00**	**%**	**14,726,000**					**0.00**	**%**	**24,550,394**	**0%**	**41%**	**0**	**%**	**24,550,394**	**0%**	**13%**	
1		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	330	Layanan	187,000,000	100	%	60,965,524.00	100	Layanan	59,999,850	0	Layanan	9,824,394	0	Layanan	14,726,000					0	Layanan	24,550,394	0%	41%	0	Layanan	24,550,394	0%	13%	
D	**Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Data Gender dan Anak**	**100**	**%**	**85,386,500**	**100**	**%**	**36,327,258**	**100**	**%**	**18,530,000**	**0.00**	**%**	**4,024,394**	**90.90**	**%**	**0**					**90.90**	**%**	**4,024,394**	**91%**	**22%**	**91**	**%**	**4,024,394**	**91%**	**5%**	
I		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perangkat Daerah yang Menghimpun Data Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**	**100**	**%**	**85,386,500**	**100**	**%**	**36,327,258**	**100**	**%**	**18,530,000**	**0.00**	**%**	**4,024,394**	**90.90**	**%**	**0**					**90.90**	**%**	**4,024,394**	**91%**	**22%**	**91**	**%**	**4,024,394**	**91%**	**5%**	
1		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia	60	Dokumen	46,400,000	100	%	19,381,972	20	Dokumen	11,000,000	0	Dokumen	4,024,394.00	20	Dokumen	0					20	Dokumen	4,024,394	100%	37%	20	Dokumen	4,024,394	33%	9%	
2		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	24	Dokumen	38,986,500	100	%	16,945,286	2	Dokumen	7,530,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0					0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	0%	0%	

E	**Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak**	**100**	**%**	**902,839,366**	**100**	**%**	**248,159,373**	**100**	**%**	**349,760,450**	**50.00**	**%**	**16,461,894**	**33.33**	**%**	**32,126,000**					**83.33**	**%**	**48,587,894**	**83%**	**14%**	**83**	**%**	**48,587,894**	**83%**	**5%**	
I		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Kelembagaan PHA**	**100**	**%**	**902,839,366**	**100**	**%**	**248,159,373**	**100**	**%**	**349,760,450**	**50.00**	**%**	**16,461,894**	**33.33**	**%**	**32,126,000**					**83.33**	**%**	**48,587,894**	**83%**	**14%**	**83**	**%**	**48,587,894**	**83%**	**5%**	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1	Organisasi	236,283,144	100	%	0	1	Organisasi	119,482,800	1	Organisasi	2,800,000	0	Organisasi	9,090,000					1	Organisasi	11,890,000	100%	10%	1	Organisasi	11,890,000	100%	5%	
1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	3	Dokumen	666,556,222	100	%	248,159,373	5	Dokumen	230,277,650	2	Dokumen	13,661,894	1	Dokumen	23,036,000					3	Dokumen	36,697,894	60%	16%	3	Dokumen	36,697,894	100%	6%	
F	**Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**100**	**%**	**1,092,600,875**	**100**	**%**	**206,158,494**	**100**	**%**	**167,604,400**	**2.67**	**%**	**9,436,591**	**2.66**	**%**	**16,276,000**					**5.32**	**%**	**25,712,591**	**5%**	**15%**	**5**	**%**	**25,712,591**	**5%**	**2%**	
I		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani**	**100**	**%**	**569,341,500**	**100**	**%**	**71,570,104**	**100**	**%**	**6,715,700**	**0.00**	**%**	**0**	**0.00**	**%**	**0**					**0.00**	**%**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**%**	**0**	**0%**	**0%**	

		Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	30	Dokumen	569,341,500	100	%	71,570,104	30	Dokumen	6,715,700	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0					0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0	0%	0%		
II		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan Khusus Anak**	**100**	**%**	**275,000,000**	**100**	**%**	**66,628,190**	**100**	**%**	**68,087,500**	**8.00**	**%**	**9,436,591**	**7.97**	**%**	**16,276,000**					**15.97**	**%**	**25,712,591**	**16%**	**38%**	**16**	**%**	**25,712,591**	**16%**	**9%**		
1		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	55	Orang	150,000,000	100	%	61,976,690.00	50	Orang	63,351,400	12	Orang	9,436,591	11	Orang	16,276,000					23	Orang	25,712,591	46%	41%	23	Orang	25,712,591	42%	17%		
2		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	105	Layanan	125,000,000	100	%	4,651,500.00	100	Orang	4,736,100	0	Orang	0	0	Orang	0					0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0	0%	0%		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100**	**%**	**248,259,375**	**100**	**%**	**67,960,200**	**100**	**%**	**92,801,200**	**0.00**	**%**	**0**	**0.00**	**%**	**0**					**0.00**	**%**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**%**	**0**	**0%**	**0%**		
		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	10	Kegiatan	248,259,375	100	%	67,960,200.00	10	Kegiatan	92,801,200	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0					0	Kegiatan	0	0%	0%	0	Kegiatan	0	0%	0%		

Catatan :

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Adanya komitmen pemerintah untuk mengentaskan dan mengurangi angka kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan dengan sasaran kemiskinan ekstrim
	: Untuk mengurangi jumlah PMKS/PPKS yang belum tertangani
	: Peningkatan SDM yang professional dalam penanganan PMKS/PPKS
	: Adanya komitmen dan dorongan pemerintah dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta pencegahan adanya diskriminasi terhadap perempuan dan anak
	: Adanya Komitmen Pemerintah dan Instansi terkait untuk Peningkatan PUG
	: Adanya Komitmen Pemerintah dan Instansi terkait melalui Lembaga PPA
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Pendataan DTKS yang kurang sinergi dengan lembaga lain (BPS, BAPPENAS) sehingga data kemiskinan yang disajikan BPS kemungkinan dapat berbeda dengan data yang ada pada PD maupun Kemensos
	: Kurangnya sarana dan fasilitas untuk penanganan PMKS/PPKS terlantar
	: Adanya anggota PSKS yang belum aktif
	: Kurang respon terhadap isu kesetaraan dan keadilan gender, budaya atau tradisi yang melekat pada masyarakat, dan kurangnya SDM perempuan ikut andil dalam pembangunan
	: Budaya atau tradisi yang melekat pada masyarakat dan kurangnya SDM Perempuan yang ikut andil dalam pembangunan
	: Terbatasnya SDM penanganan kasus, kekurangan alat bukti, ketakutan korban untuk melaporkan kasus

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Perbaikan pada target di beberap program dan kegiatan agar SMART-C
	: Menindaklanjuti hasil evaluasi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja tahun berikutnya	: Memperhatikan dan mencermati kembali konsistensi antara renstra dan renja periode berikutnya
	: Kualitas laporan renja perlu ditindaklanjuti agar sesuai dengan keadaan PD dan anggaran yang usulkan pada RKPD
	: Adanya laporan evaluasi anggaran maupun fisik setiap triwulan pada renja masing-masing PD

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil evaluasi yang tertera di Tabel 2.1. menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sampai dengan Triwulan II sebesar 39% dan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 21%.

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Triwulan I sangat rendah sesuai dengan kategori pada tabel 2.2. Hal ini dikarenakan penyerapan anggaran yang masih belum maksimal pada Bantuan Sosial Disabilitas, LKSA, Lansia Miskin, dan Siswa Miskin. Selain Bantuan Sosial terdapat Hibah PMI dan WCC, serta adanya penambahan anggaran pada DBHCHT. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencan aksi dan anggaran kas;
2. Melaksanakan kegiatan yang sudah diajukan dan disetujui pada Rankhir Perubahan RKPD dan Rankhir Perubahan APBD;
3. Melaksanakan Pencairan Bantuan Sosial dan Hibah yang direncanakan pada triwulan II.

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan

perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	102%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan rutin masih menyesuaikan kebutuhan, tercapainya nilai SAKIP dari target yang ditentukan	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Pemberdayaan Sosial	24%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan 2 kegiatan dilaksanakan pada triwulan III, penyerapan anggaran masih sebatas atk dan HR non asn dan 1 kegiatan yang dilaksanakan	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Rehabilitasi Sosial	8%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Pelayanan yang diberikan serta adanya Bantuan Sosial Disabilitas dan LKSA serta Hibah PMI yang belum terealisasi,	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan

dikarenakan pelaksanaan pencairan Bantuan Sosial dan Hibah dilaksanakan pada triwulan II		
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	29%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan masih sebatas HR Non ASN, sedangkan untuk kegiatan masih dilaksanakan pada triwulan III, selain itu adanya Bantuan Sosial Siswa Miskin, Lansia Miskin dan DBHCHT yang belum di realisasikan	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Penanganan Bencana	70%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pemberian bahan makanan menyesuaikan terjadinya bencana baik sosial maupun alam	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	0%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pemeliharaan TMP masih dilaksanakan pada triwulan III, pada program ini masih sebatas pembayaran HR Non ASN	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	38%	Sangat Rendah

Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan masih pada triwulan III dan IV	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Perlindungan Perempuan	0%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Penanganan kasus perempuan menyesuaikan jumlah kasus yang dilaporkan serta belum terealisasikannya Hibah WCC	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	17%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan masih pada triwulan III dan IV	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	91%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Penyajian dan Pemanfaat Data Gender dilaksanakan pada triwulan IV	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	83%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Pelaksanaan kegiatan masih dalam proses	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan
Program Perlindungan Khusus Anak	5 %	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Penanganan kasus anak menyesuaikan jumlah kasus yang dilaporkan	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target kinerja yang sudah ditentukan	Mengecek dan melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi dan angkas yang sudah ditentukan

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator
1	Persentase Penduduk Miskin Ekstrim
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja kunci Dinsos PPPA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja Kunci

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator
1	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani
2	Persentase jumlah PSKS yang aktif
3	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender
4	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya
5	Skor Kabupaten Layak Anak

Data pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial PPPA akan dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial PPPA	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Sosial PPPA			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Penduduk Miskin Ekstrim	-	-	-	0,5%	0,3%	0,1%	10,99%	-	-	4,54%	-	-
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-	70,50	71,00	71,25	70,87 (Tahun 2022)	-	-	100,52%	-	-

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial PPPA	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Sosial PPPA			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
2	Persentase jumlah PSKS yang aktif	-	-	-	72,5%	73%	74%	74,44%	-	-	102,67%	-	-
3	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	-	-	-	33,33%	42,26%	51,19%	100%	-	-	300,03	-	-
4	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
5	Skor Kabupaten Layak Anak	-	-	-	(650) Madya	(750) Nindya	(850) Utama	0	-	-	0	-	-

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	Target SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi Realisasi			Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Urusan Sosial												
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	85%	85%	85%	95,38%	-	-	112,21%	-	-	
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	85%	85%	85%	0%	-	-	0%	-	-	
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	85%	85%	85%	92,31%	-	-	108,6%	-	-	
4	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	85%	85%	85%	91,67%	-	-	107,84%	-	-	
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	85%	85%	85%	84%	-	-	98,82%	-	-	

2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil penelahaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak mendapat usulan program/ kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan Hasil musrembang Kecamatan.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk yang tertuang dalam RPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2024, yaitu Visi Kabupaten Nganjuk Tahun Tahun 2005-2025 yaitu **"NGANJUK YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA"**, dan telah dirumuskan misi pembangunan daerah, yaitu **"Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur, adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam menkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil, memantapkan reformasi birokrasi menuju profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik."**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan kesejahteraan sosial;
3. Peningkatan kesempatan kerja;
4. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat;
5. Peningkatan kualitas Pendidikan;
6. Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup;
7. Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah;
8. Peningkatan dan Penguatan Perekonomian Daerah;
9. Pengembangan Agropolitan dan food estate;
10. Pelestarian Seni Budaya Lokal;
11. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif;

12. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik;
13. Menjaga stabilitas sosial politik dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
14. Percepatan Transformasi Digital

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada dasarnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu 2 urusan.

3.1 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait Urusan Sosial:
   1) Data PPKS/PMKS/DTKS yang masih perlu validasi secara berkelanjutan;
   2) Masih perlu peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung layanan PPKS/PMKS
b. Permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
   1) Implementasi Kebijakan Gender Mainstreaming dan Gender Budgeting belum berjalan optimal;
   2) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti Pekerja Anak, Perkawinan Anak, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
   3) Perlu Ditingkatkannya Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait Psikologi Klinis dan Konselor;
   4) Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu masih kurang maksimal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rankhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Dalam Rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk maka, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu 2 Urusan. Urusan Sosial Berkaitan dengan **"NGANJUK TUMBUH"** sedangkan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkaitan dengan **"NGANJUK SEHAT DAN CERDAS"**, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk ahun 2024, yaitu:

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

1. **Mengurangi Penduduk Miskin**

   Indikator : Persentase Penduduk Miskin Ekstrim

   Sasaran yang dicapai dari tujuan ini meliputi sebagai berikut :

   "Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial"

   Indikator : - Persentase Jumlah PMKS/PPKS yang Tertangani
   - Persentase Jumlah PSKS yang Aktif

2. **Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan**

   Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

   Sasaran yang dicapai dari tujuan ini adalah :

   "Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak"

   Indikator :
   - Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender
   - Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya
   - Skor Kabupaten Layak Anak

Target kinerja Dinas Sosial PPPA sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
Mengurangi Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin Ekstrim	0,5
Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,50
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2024**
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	100
	Persentase jumlah PSKS yang aktif	72,5
Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	33,33
	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100
	Skor Kabupaten Layak Anak	(650) Madya

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Dari berbgai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk

Tahun 2024

Analisis perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Tahun 2024

Adapun secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan pada anggaran perubahan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai plafon anggaran pagu indikatif perubahan, yaitu sebagaimana berkut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp. 3.864.967.000,- menjadi Rp. 3.569.991.000,- (berkurang Rp. 294.976.000,-) dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 354.296.000,- untuk pengurangan Gaji dan Tunjangan Pegawai dikarenakan jumlah ASN pada Dinas Sosial PPPA berkurang dari semula berjumlah 24 orang menjadi 19 orang.
   - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 59.320.000,- untuk penambahan pagu pada perjalanan dinas luar daerah.
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 54.500.000,- (bertambah Rp. 4.500.000,-) dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- untuk penambahan pada pagu HR Narasumber dan Senam.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp. 240.377.150,- menjadi Rp. 293.439.400,- (bertambah Rp. 53.062.250,-) dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 12.120.500,- untuk penambahan pada pagu pembelian bahan dan alat komputer.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 4.076.800,- untuk penambahan pagu pada Pembayaran Jasa Iklan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 600.000,- untuk penambahan pagu pada Pembayaran Koran Jawa Pos
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 17.110.000,- untuk Penambahan Nasi dan Snack Mengingat Anggaran Dinas Sosial PPPA Bulan Mei Mengadakan Baksos Operasi Mata Katarak Gratis.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 19.154.950,- untuk Penambahan Nasi dan Snack Mengingat Anggaran Dinas Sosial PPPA Bulan Mei Mengadakan Baksos Operasi Mata Katarak Gratis.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp. 109.221.950,- menjadi Rp. 264.955.800,- (bertambah Rp. 155.733.850,-) dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 63.780.500,- untuk Pengadaan Mebel untuk Kegiatan Operasional Dinas Sosial PPPA dan Sarana Prasarana DBHCHT.
   - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 91.953.350,- untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk Kegiatan Operasional Dinas Sosial PPPA dan Sarana Prasarana DBHCHT.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp. 445.405.000,- menjadi Rp. 428.200.000,- (berkurang Rp. 17.205.000,-) dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mengalami perubahan anggaran sebesar (Rp. 5.000,-) Pergeseran dari Sub Rincian Pengiriman ke Materai dan ke Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mengalami perubahan anggaran sebesar (Rp. 19.200.000,-) Pergeseran dari listrik dan telepon ke Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- untuk penambahan pagu pada gaji tenaga non asn yang belum tercukupi sampai bulan Desember.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp. 485.862.400,- menjadi Rp. 507.305.700,- (bertambah Rp. 21.443.300,-) dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami perubahan anggaran sebesar (Rp. 120.006.700,-) untuk Pergeseran ke Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin serta Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 7000.000,- untuk Pemeliharaan AC dan Komputer Dinas Sosial PPPA.
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 134.450.000,- untuk pemeliharaan Gedung Tagana dan aula/ Ruang Rapat Dinas Sosial PPPA

B. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp. 1.055.664.800,- menjadi Rp. 1.058.064.800,- (bertambah Rp. 2.400.000,-) dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
    - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 2.400.000,- untuk penambahan pagu pada gaji tenaga non asn yang belum tercukupi sampai bulan Desember.

C. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp. 7.051.117.200,- menjadi Rp. 12.191.917.200,- (bertambah Rp. 5.140.800.000,-) dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
    - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 4.800.000,- untuk penambahan pagu pada gaji tenaga non asn yang belum tercukupi sampai bulan Desember.
    - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 5.136.000.000,- untuk penambahan pagu pada gaji tenaga non asn yang belum tercukupi sampai bulan Desember.

D. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp. 64.500.000,- menjadi Rp. 63.500.000,- (berkurang Rp. 1.000.000,-) dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:

- Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG mengalami perubahan anggaran sebesar (Rp. 1.000.000,-) Pergeseran ke Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp. 208.300.000,- menjadi Rp. 259.160.000,- (bertambah Rp. 50.860.000,-) dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 50.860.000,- untuk Kegiatan Peringatan Hari Ibu, SAPA MAMA, dan Pembinaan Organisasi Perempuan.
3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp. 59.999.850,- menjadi Rp. 60.139.850,- (bertambah Rp. 140.000,-) dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 140.000,- untuk Penambahan JKK dan JKM bagi Tenaga Non ASN yang Belum Tercukupi.

E. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PHA)

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp. 349.760.450,- menjadi Rp. 372.324.650,- (bertambah Rp. 22.564.200,-) dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan

Kabupaten/Kota mengalami perubahan anggaran sebesar (Rp. 8.753.000,-) Pergeseran ke Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 31.317.200,- untuk Kegiatan Bimbingan Teknis KHA dan Evaluasi bagi Forum Anak.

F. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari Rp. 68.267.500,- menjadi Rp. 73.767.500,- (bertambah Rp. 5.200.000,-) dengan rincian Sub Kegiatan antara lain:
   - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 5.200.000,- untuk penambahan pagu pada gaji tenaga non asn yang belum tercukupi sampai bulan Desember.

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, berikut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat yang mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal tahun 2024.

Tabel 3.2 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 Pendukung Standar Pelayanan Minimal

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Pagu Indikatif	Penaggung Jawab
1	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**2.427.208.200**	
2		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**1.058.064.800**	
3		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	37.216.800	Dinas Sosial PPPA
4		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	536.500.000	Dinas Sosial PPPA
				Pemberian Layanan Kedaruratan	484.348.000	Dinas Sosial PPPA
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**1.369.143.400**	
				Penyediaan Permakanan	414.540.450	Dinas Sosial PPPA

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Pagu Indikatif	Penaggung Jawab
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	167.502.950	Dinas Sosial PPPA
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.000.000	Dinas Sosial PPPA
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	782.100.000	Dinas Sosial PPPA
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**12.191.917.200**	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**12.191.917.200**	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	209.562.300	Dinas Sosial PPPA
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	11.982.354.900	Dinas Sosial PPPA
5		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**340.937.450**	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**71.553.650**	
				Penyediaan Makanan	71.553.650	Dinas Sosial PPPA
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/ Kota	**269.383.800**	

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Pagu Indikatif	Penaggung Jawab
				Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	269.383.800	Dinas Sosial PPPA
Jumlah Total					**14.960.062.850**	

Untuk mendukung program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diberikan belanja hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga/Organisasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah (Orang /Lembaga)	Rincian (Rp)	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
1.1	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Bantuan Sosial	Penyandang Disabilitas	351	526.500.000	APBD
1.2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Belanja Hibah	PMI	1	400.000.000	APBD
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
1.3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Bantuan Sosial	LKSA	21	777.100.000	APBD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah (Orang /Lembaga)	Rincian (Rp)	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
1.5	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Sosial	Lansia Miskin	4.049	6.476.800.000	APBD
		Bantuan Sosial	Siswa Miskin (SMK/SMA/MA)	385	288.750.000	APBD
		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	DBHCHT	4.197	5.136.000.000	APBD
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah (Orang /Lembaga)	Rincian (Rp)	
2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Hibah	WCC	1	150.000.000	APBD

BAB IV
P E N U T U P

4.1. Catatan Penting

Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka harus sesuai peraturan perundangan, tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, memperhatikan sinergitas antar bidang dan antar sektor, serta rasa dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya, dan visi misi Kepala daerah terpilih.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
b. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakankoordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

c. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
d. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadual yang telah ditetapkan.

Nganjuk,

Pj. BUPATI NGANJUK

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP.,M.Si